

BAB I

PENDAHULUAN.

1.1 Latar Belakang.

Dalam era otonomi daerah yang sekarang ini, tentu proses pendelegasian wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat, merupakan salah satu tanggung jawab yang besar. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, didefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur, serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempat, sesuai dengan kepentingan masyarakat sekitar. Hal ini sesuai dengan pendapat Mohammad, Firman dan Hirabertus (2006;185), bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengatur seluruh sumber daya yang ada pada daerah guna meningkatkan kemakmuran masyarakat. Diberikannya pemberlakuan otonomi daerah, diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi yang dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting bagi pemerintah daerah. Menurut Kuncoro (2004:164), keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat melalui tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan meningkatnya pendapatan antar penduduk, antar daerah serta sektor. Akan tetapi, keberhasilan dalam mendorong tingkat pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa indikator, seperti keuangan daerah serta sumber daya yang dimiliki.

Keuangan daerah menjadi indikator penting dalam peningkatan pembangunan ekonomi. Tingginya keuangan daerah dapat membiayai penyelenggaraan kegiatan ekonomi daerah. Dalam hal ini, daerah otonom harus mampu mengelola, menggali sumber-sumber keuangannya dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerahnya, (Mahmudi 2009:3). Dapat dikatakan bahwa, tingginya keuangan daerah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, kemajuan ekonomi dan terlaksananya otonomi daerah. Menurut ketentuan yang ada dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, pendapatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi bersumber dari a) pendapatan asli daerah (PAD); b) dana perimbangan ; dan c) lain-lain pendapatan yang sah.

PAD merupakan salah satu penerimaan daerah. Tingginya PAD suatu daerah akan mencerminkan terlaksananya desentralisasi fiskal. PAD merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi daerah, yang diukur melalui besarnya target PAD kabupaten/kota setiap tahun anggaran (Saptianingsih 2009). Proporsi peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari kegiatan pajak daerah, serta retribusi daerah tidak seluruhnya dapat membiayai keadaan pembangunan daerah serta pengeluaran pemerintah. Hal inilah yang membuat pemerintah daerah terus menggali sumber keuangan daerah demi kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, tidak semua pemerintah daerah memiliki penerimaan keuangan yang sama. Hal ini dikarenakan potensi-potensi dan sumber daya yang dimiliki pada masing-masing daerah berbeda-beda.

Perbedaan potensi serta sumber daya inilah yang membuat adanya ketimpangan penerimaan pada masing-masing daerah. Adanya ketimpangan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD dapat menghambat proses pembangunan ekonomi daerah. Terhambatnya proses pembangunan ekonomi tersebut, dikarenakan sumber penerimaan daerah yaitu PAD tidak mampu untuk membiayai seluruh penyelenggaraan pembangunan ekonomi. Dalam permasalahan ini, pemerintah pusat turut memberikan bantuan dana terhadap pemerintah daerah guna pemerataan penerimaan daerah. Dana perimbangan merupakan salah satu dana yang diperoleh dari APBN dan diperuntukkan bagi daerah. Adanya transfer dana tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan daerah serta membiayai penyelenggaraan pembangunan, sehingga proses pembangunan ekonomi berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan.

Perkembangan ekonomi Indonesia terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah. Provinsi yang memiliki 35 kabupaten/kota, cukup dikenal sebagai daerah yang memiliki tingkat pertanian yang tinggi serta industri barang dan jasa. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi indikator untuk melihat perkembangan pembangunan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun. Tabel di bawah menunjukkan laju pertumbuhan PDRB kab/kota Jawa Tengah.

**Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB kabupaten/kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2018 (persen)**

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Cilacap	4,1	2,0	1,7	2,9	6,0	5,1	2,6	3,1
02	Banyumas	6,6	5,9	7,0	5,7	6,1	6,1	6,3	6,5
03	Purbalingga	5,7	5,8	5,3	4,8	5,5	4,9	5,4	5,4
04	Banjarnegara	5,4	5,2	5,4	5,3	5,5	5,4	5,6	5,7
05	Kebumen	6,2	4,9	4,6	5,8	6,3	5,0	5,1	5,5
06	Purworejo	5,6	4,6	4,9	4,5	5,3	5,1	5,3	5,3
07	Wonosobo	5,4	4,7	4,0	4,8	4,7	5,4	3,9	4,9
08	Magelang	6,7	4,9	5,9	5,4	5,2	5,4	5,3	5,4
09	Boyolali	6,3	5,3	5,8	5,4	6,0	5,3	5,8	5,7
10	Klaten	6,3	5,7	6,0	5,8	5,3	5,2	5,3	5,6
11	Sukoharjo	5,9	5,9	5,8	5,4	5,7	5,7	5,8	5,8
12	Wonogiri	3,6	5,9	4,8	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4
13	Karanganyar	4,9	5,9	5,7	5,2	5,1	5,4	5,8	6,0
14	Sragen	6,6	6,1	6,7	5,6	6,1	5,8	6,0	5,7
15	Grobogan	3,2	5,1	4,6	4,1	6,0	4,5	5,9	5,9
16	Blora	4,4	4,9	5,4	4,4	5,4	23,5	6,0	4,4
17	Rembang	5,2	5,3	5,4	5,1	5,5	5,3	6,3	5,9
18	Pati	5,9	5,9	6,0	4,6	6,0	5,5	5,7	5,7
19	Kudus	4,2	4,1	4,4	4,4	3,9	2,5	3,2	3,2
20	Jepara	4,9	5,9	5,4	4,8	5,1	5,1	5,4	5,9
21	Demak	5,4	4,5	5,3	4,3	5,9	5,1	5,8	5,4
22	Semarang	6,3	6,0	6,0	5,8	5,5	5,3	5,7	5,8
23	Temanggung	6,1	4,3	5,2	5,0	5,2	5,0	4,9	5,1
24	Kendal	6,6	5,2	6,2	5,1	5,2	5,6	5,8	5,5
25	Batang	6,1	4,6	5,9	5,3	5,4	5,0	5,5	5,7
26	Pekalongan	5,7	4,8	6,0	4,9	4,8	5,2	5,4	5,8
27	Pemalang	5,0	5,3	5,6	5,5	5,6	5,4	5,7	5,8
28	Tegal	6,4	5,2	6,7	5,0	5,5	5,9	5,4	5,5
29	Brebes	6,6	4,6	5,9	5,3	6,0	5,1	5,7	5,3
	Rata-rata kabupaten	5,6	5,1	5,4	5,0	5,5	5,8	5,4	5,4
30	Magelang	6,1	5,4	6,0	5,0	5,1	5,2	5,4	5,6
31	Surakarta	6,4	5,6	6,3	5,3	5,4	5,4	5,7	5,7
32	Salatiga	6,6	5,5	6,3	5,6	5,2	5,3	5,6	5,5
33	Semarang	6,6	6,0	6,2	6,3	5,8	5,9	6,5	6,5
34	Pekalongan	5,5	5,6	5,9	5,5	5,0	5,4	5,3	5,7
35	Tegal	6,5	4,2	5,7	5,0	5,4	5,5	5,9	5,9
	Rata-rata kota	6,3	5,4	6,1	5,4	5,3	5,4	5,8	5,8

Sumber; Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, data diolah

Pada Tabel 1.1 di atas, menunjukkan laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2018. Tabel tersebut menunjukkan, bahwa tingkat pertumbuhan PDRB kabupaten dan kota cenderung berfluktuasi. Apabila dilihat dari rata-rata laju pertumbuhan kabupaten, maka rata-rata laju pertumbuhan kabupaten yaitu sebesar 5,4%. Ada beberapa kabupaenyang tidak mencapai rata-rata pertumbuhan PDRB yaitu kabupaten Cilacap dan Blora. Sedangkan pada kota, rata-rata laju pertumbuhan yang terjadi di kota Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 5,7%. Tingkat pertumbuhan pada kota masih lebih baik jika dibandingkan dengan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Perbedaan pertumbuhan pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah di atas, dikarenakan sumber daya serta potensi daerah yang berbeda-beda. Perbedaan pertumbuhan PDRB pada kabupaten/kota dapat mengidentifikasi bahwa, daerah tersebut masih memiliki ketimpangan sumber penerimaan daerah. Adanya ketimpangan penerimaan, yang menghambat proses penyelenggaraan pembangunan dari masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Pada beberapa daerah masih cenderung tertinggal dalam pembangunan ekonomi. Secara umum pendapatan daerah bersumber dari (PAD) dan dana perimbangan. Perkembangan pendapatan asli daerah (PAD) dari masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini.

**Tabel 1.2 Laju Penerimaan PAD Kab/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2018 (persen)**

Kabupaten/kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Banjarnegara	13,80	32,58	4,99	63,33	11,70	22,42	34,58	-20,67
Kab. Banyumas	16,38	26,16	27,36	41,27	15,31	7,79	14,45	4,63
Kab. Batang	32,44	40,84	69,38	20,30	4,10	16,82	4,69	6,94
Kab. Blora	42,33	22,33	16,11	52,03	8,07	9,51	50,90	-21,49
Kab. Boyolali	11,85	32,03	25,86	41,53	14,56	12,15	32,72	-12,05
Kab. Brebes	10,21	30,06	31,46	14,63	12,77	12,32	-49,01	-6,99
Kab. Cilacap	15,11	14,13	41,61	34,30	9,58	4,58	50,68	-18,31
Kab. Demak	31,37	41,32	31,18	59,41	15,43	13,03	7,71	10,57
Kab. Grobogan	12,18	19,96	36,15	63,87	15,90	9,71	47,21	-28,31
Kab. Jepara	22,34	24,54	3,64	73,18	16,65	19,34	0,94	13,46
Kab. Karanganyar	30,90	12,13	38,57	33,13	18,65	17,95	37,45	-79,34
Kab. Kebumen	25,15	39,26	28,43	84,12	1,27	18,71	52,43	-20,66
Kab. Kendal	8,18	28,81	13,21	58,27	11,27	10,65	52,78	-17,07
Kab. Klaten	31,71	17,24	36,20	54,12	7,14	17,61	65,40	6,76
Kab. Kudus	15,34	11,58	19,81	61,44	9,06	9,38	31,08	-89,16
Kab. Magelang	18,94	36,77	40,03	39,94	7,89	10,29	38,73	-32,97
Kab. Pati	19,51	21,76	3,29	65,12	11,03	1,57	42,84	-14,62
Kab. Pekalongan	20,39	41,09	28,65	72,69	-1,36	23,46	-5,55	6,12
Kab. Pemaslari	4,23	22,93	39,21	59,39	6,02	19,54	52,16	-28,35
Kab. Purbalingga	18,98	9,28	18,41	64,90	6,43	16,79	41,32	-20,56
Kab. Purworejo	27,77	10,48	29,82	56,98	16,82	9,26	16,83	-3,90
Kab. Rembang	12,53	39,73	22,75	30,54	16,67	21,25	34,61	-3,02
Kab. Semarang	34,77	17,20	38,16	15,08	12,34	14,23	31,04	-8,13
Kab. Sragen	18,70	35,10	14,90	73,38	5,24	11,01	36,14	-17,37
Kab. Sukoharjo	49,22	71,53	16,98	37,23	18,55	15,68	27,92	-6,58
Kab. Tegal	23,36	31,74	31,58	62,38	19,82	3,96	1,92	14,53
Kab. Temanggung	14,73	23,95	30,01	57,45	32,21	32,39	9,65	-18,30
Kab. Wonogiri	18,74	29,68	11,55	63,23	15,95	3,50	9,62	12,17
Kab. Wonosobo	29,42	22,16	32,06	61,24	4,16	9,47	14,07	-0,53
Rata-rata kabupaten	21,74	27,81	26,94	52,22	11,84	13,60	41,34	-13,56
Kota Magelang	6,73	43,67	17,99	53,08	13,19	18,02	6,01	6,99
Kota Pekalongan	33,37	43,98	25,27	26,09	5,54	17,47	7,50	-6,66
Kota Salatiga	17,58	28,36	36,38	56,22	0,76	22,01	8,09	-5,14
Kota Semarang	59,01	49,48	18,77	22,94	5,55	24,14	20,13	-3,74
Kota Surakarta	58,93	27,93	28,80	12,49	11,06	14,14	23,98	0,04
Kota Tegal	15,71	33,62	12,58	37,17	12,26	5,80	6,78	-10,37
Rata-rata kota	31,89	37,84	23,30	34,67	8,06	16,93	12,08	-3,15

Sumber Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DPJK) 2019, Diolah.

Tabel 1.2 di atas, menunjukkan laju penerimaan (PAD) dari tahun 2011-2018. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa, rata-rata penerimaan PAD di kota sangat besar, jika dibandingkan dengan laju rata-rata penerimaan PAD pada masing-masing kabupaten. Pada tahun pertama yaitu 2011 mengalami peningkatan penerimaan PAD, akan tetapi pada tahun terakhir yaitu 2018 terjadi penurunan pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tingkat penerimaan PAD tidak sejalan dengan tingkat penerimaan PDRB pada masing-masing kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berbeda dengan *Keynesian Theory* yang menyatakan, ketika pendapatan meningkat maka pertumbuhan juga akan meningkat. Perbedaan penerimaan daerah membuat terhambatnya proses pertumbuhan ekonomi. Pada sumber penerimaan daerah tidak hanya terdiri dari PAD, melainkan juga terdiri dari dana perimbangan.

Pada tabel 1.3 menunjukan laju penerimaan dana perimbangan pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dari tabel di bawah menunjukkan bahwa, rata-rata penerimaan dana perimbangan pada kabupaten tahun 2018 sebesar kabupaten 0,84, sedangkan rata-rata dari tahun 2011-2018 sebesar 9,96. Pada tingkat kabupaten tidak semua mencapai rata-rata tersebut. Penerimaan dana perimbangan pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar -0,46. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diambil kesimpulan, di mana tingkat penerimaan dana perimbangan terhadap kota/ kabupaten mulai menurun.

Tabel 1.3 Laju Penerimaan Dana Perimbangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2018 (persen)

Kabupaten/kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Banjarnegara	9,33	18,19	10,69	4,10	11,78	23,48	29,42	-17,23
Kab. Banyumas	14,20	19,59	6,14	6,85	3,91	32,40	-0,04	1,39
Kab. Batang	13,72	18,27	7,35	5,37	6,30	26,58	-14,08	18,33
Kab. Blora	8,46	14,76	10,31	8,07	4,63	30,59	1,26	2,01
Kab. Boyolali	9,75	18,02	8,40	9,47	3,02	24,36	-0,29	6,21
Kab. Brebes	6,44	22,17	10,73	7,17	3,69	25,94	-15,63	18,93
Kab. Cilacap	8,08	17,05	10,78	6,00	6,48	24,20	-3,41	-0,04
Kab. Demak	9,64	20,94	9,86	5,20	5,90	29,81	-2,87	-2,06
Kab. Grobogan	7,96	21,28	10,04	5,20	4,91	25,60	18,12	-13,58
Kab. Jepara	8,59	17,26	10,01	7,81	9,20	25,19	-4,84	1,74
Kab. Karanganyar	8,72	23,24	7,60	6,12	7,95	34,73	0,59	4,27
Kab. Kebumen	13,52	23,26	7,50	8,65	8,88	32,49	-3,78	-3,40
Kab. Kendal	8,59	21,13	7,59	5,97	3,34	26,83	-0,47	3,32
Kab. Klaten	8,85	19,26	6,96	6,47	2,35	22,94	3,25	1,69
Kab. Kudus	7,47	23,22	15,62	6,06	2,09	24,91	1,55	3,03
Kab. Magelang	5,34	22,70	0,76	6,17	3,12	12,33	-4,23	20,32
Kab. Pati	8,62	23,15	9,76	6,31	4,39	30,00	6,94	-3,06
Kab. Pekalongan	9,63	21,85	8,29	7,49	6,24	20,88	8,50	0,42
Kab. Pemasang	7,23	23,57	6,59	6,92	9,14	25,54	3,08	-0,73
Kab. Purbalingga	13,78	20,14	9,63	4,55	3,80	30,45	5,68	-0,16
Kab. Purworejo	9,95	19,89	6,34	6,50	5,17	33,37	-8,24	3,33
Kab. Rembang	13,75	21,04	3,52	8,24	9,91	9,76	14,86	-16,08
Kab. Semarang	11,46	18,86	8,56	8,75	-0,39	39,23	-3,16	1,84
Kab. Sragen	11,57	22,19	9,50	7,87	9,75	25,00	-2,86	-0,34
Kab. Sukoharjo	5,99	15,73	11,03	7,43	4,12	32,00	-2,33	0,16
Kab. Tegal	8,57	21,89	8,16	6,58	3,87	25,86	9,08	-7,11
Kab. Temanggung	10,10	23,02	5,06	8,88	5,07	25,01	1,40	-0,77
Kab. Wonogiri	9,45	18,05	9,56	4,74	5,28	28,28	2,73	1,27
Kab. Wonosobo	9,23	18,07	8,68	8,77	1,42	29,03	5,01	0,58
Rata-rata kabupaten	9,58	20,27	8,45	6,82	5,36	26,79	1,56	0,84
Kota Magelang	14,03	16,94	8,35	6,65	0,66	22,65	-2,56	3,14
Kota Pekalongan	8,67	18,80	9,81	5,56	3,35	21,87	-2,08	0,04
Kota Salatiga	7,96	25,44	4,35	11,36	1,39	24,97	4,08	-5,41
Kota Semarang	0,23	20,41	2,04	7,02	-0,34	29,43	-0,20	1,95
Kota Surakarta	-5,23	22,72	5,60	6,30	-5,21	46,07	-5,05	4,08
Kota Tegal	5,42	26,30	9,05	1,61	14,49	37,41	-6,29	-6,57
Rata-rata kota	5,18	21,77	6,53	6,42	2,39	30,40	-2,02	-0,46

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DPJK) 2019, Diolah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rarung (2016) menemukan bahwa, pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap PDRB. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan penelitian dilakukan oleh, Fauzan, Amir, & Kahar (2018), bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan urain yang telah dijelaskan dalam latar belakang, peneliti ingin mengetahui dan menganalisa bagaimana “**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan Terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2018**”.

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2018?

1.3 Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah: Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap PDRB di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2018.

1.4 Manfaat Penelitian.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Peneliti dan Pembaca, sebagai bahan referensi dan perbandingan studi atau penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Pemerintah, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pemerintah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah serta sebagai bahan pengambilan keputusan dalam yang berkaitan dengan PDRB.

1.5 Hipotesis Penelitian.

Hipotesis merupakan pendapat sementara peneliti, yang menjadi pedoman dalam melakukan penelitian, sehingga dapat dilakukan berdasarkan teori terkait yang akan dianalisis dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan antara variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan studi empiris, dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap PDRB.
2. Dana perimbangan (DP) berpengaruh positif terhadap PDRB.

1.6 Sistematika Penulisan.

Dalam penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab, penyusunannya dilakukan secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitinaan,hipotesis dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang konsep dan teori yang relevan dengan permasalahan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan hal mengenai lokasi riset, data, model, alat analisis, dan batasan oprasional yang digunakan dalam riset.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu.

BAB V PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran (implikasi kebijakan) dinyatakan secara terpisah.